

<p style="text-align: center;">POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN BONE</p>  <p style="text-align: center;">BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN</p>		<table border="1"> <tr> <td>Nomor SOP : SOP.50/BRSDM-POLTEK.BN/BU.05/VII/2024</td> </tr> <tr> <td>Tgl Pembuatan : 1 Juli 2024</td> </tr> <tr> <td>Tgl Revisi :</td> </tr> <tr> <td>Tgl Efektif : 8 Juli 2024</td> </tr> <tr> <td>Disahkan oleh</td> </tr> <tr> <td colspan="2">  Dr. Muhammad Syaiful, S.Pd., M.Si. NIP: 9740304 19903 1 002 </td> </tr> <tr> <td>Nama SOP :</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Pendokumentasian Data Informasi Publik</td> </tr> </table>	Nomor SOP : SOP.50/BRSDM-POLTEK.BN/BU.05/VII/2024	Tgl Pembuatan : 1 Juli 2024	Tgl Revisi :	Tgl Efektif : 8 Juli 2024	Disahkan oleh	 Dr. Muhammad Syaiful, S.Pd., M.Si. NIP: 9740304 19903 1 002		Nama SOP :	Pendokumentasian Data Informasi Publik																																									
Nomor SOP : SOP.50/BRSDM-POLTEK.BN/BU.05/VII/2024																																																				
Tgl Pembuatan : 1 Juli 2024																																																				
Tgl Revisi :																																																				
Tgl Efektif : 8 Juli 2024																																																				
Disahkan oleh																																																				
 Dr. Muhammad Syaiful, S.Pd., M.Si. NIP: 9740304 19903 1 002																																																				
Nama SOP :																																																				
Pendokumentasian Data Informasi Publik																																																				
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Dasar Hukum</th> <th>Kualifikasi Pelaksana</th> <th>Peralatan/Perlengkapan</th> <th>Pencatatan dan Pendataan</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</td> <td>1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik</td> <td>1. Komputer, laptop, ATK</td> <td>1. Buku Tamu/Agenda</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</td> <td>2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik</td> <td>2. Jaringan internet</td> <td>2. Daftar pemohon</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelegaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</td> <td>3. Mempunyai communication skill</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik</td> <td>4. Kemampuan pendokumentasian informasi</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/I/II/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Keterkaitan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 1 SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan 2 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 3 SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 4 SOP Uji Konsekuensi 5 SOP Penutupkan dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) 6 SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik </td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">Peringatan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	Peralatan/Perlengkapan	Pencatatan dan Pendataan	1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik	1. Komputer, laptop, ATK	1. Buku Tamu/Agenda	2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik	2. Jaringan internet	2. Daftar pemohon	3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelegaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3. Mempunyai communication skill			4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	4. Kemampuan pendokumentasian informasi			5					6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/I/II/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan				Keterkaitan					1 SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan 2 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 3 SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 4 SOP Uji Konsekuensi 5 SOP Penutupkan dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) 6 SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik					Peringatan				
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	Peralatan/Perlengkapan	Pencatatan dan Pendataan																																																
1	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Memahami peraturan yang berkaitan dengan informasi publik	1. Komputer, laptop, ATK	1. Buku Tamu/Agenda																																																
2	Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	2. Memahami peraturan yang berkaitan dengan pelayanan publik	2. Jaringan internet	2. Daftar pemohon																																																
3	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 42/PERMEN-KP/2023 tentang Penyelegaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan	3. Mempunyai communication skill																																																		
4	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 43/PERMEN-KP/2015 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1 tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik	4. Kemampuan pendokumentasian informasi																																																		
5																																																				
6	Keputusan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi NOMOR 1/PPID-KKP/I/II/2024 tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan																																																			
Keterkaitan																																																				
1 SOP Pendokumentasian Informasi Yang Dikecualikan 2 SOP Pengelolaan Permohonan Informasi 3 SOP Pengelolaan Keberatan Atas Informasi 4 SOP Uji Konsekuensi 5 SOP Penutupkan dan Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) 6 SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik																																																				
Peringatan																																																				

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan
		Petugas Layanan Informasi	PPID Pelaksana Eselon I	Atasan PPID Kementerian	Arsiparis	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Petugas pelayanan informasi melakukan identifikasi terkait informasi yang akan didokumentasikan pada unit kerja UPT di lingkungan KKP	○	○	○	○	Komputer dan ATK	5 menit	Dokumen	Pemohon datang langsung
2	Melakukan koordinasi dengan PPID Pelaksana dalam menghimpun serta mendokumentasikan data dan informasi publik	○	○	○	○	Komputer, jaringan Internet	15 menit	Dokumen	Asistensi pencarian informasi, log-in ke aplikasi
3	PPID Pelaksana mempersiapkan alat kerja yang akan digunakan dalam melakukan dokumentasi informasi	○	○	○	○	Komputer dan ATK	5 menit	Dokumen	
4	Petugas mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dari berbagai sumber dalam mendokumentasikan informasi publik	○	○	○	○	Komputer, ATK, jaringan internet	1 hari kerja	Dokumen/Arsip	
5	Mengolah dan menyusun data hasil informasi yang telah didokumentasikan dalam bentuk soft file	○	○	○	○	Komputer, jaringan Internet	1 hari	Dokumen/Arsip	
6	Melaporkan kepada atasan PPID Kementerian hasil informasi yang telah didokumentasikan untuk memperoleh perbaikan atau koreksi	○	○	○	○	Komputer, ATK	1 jam	Surat/Memo	
7	Hasil final dokumen informasi dari PPID Kementerian dipublikasikan melalui website PPID KKP	○	○	○	○	Komputer, jaringan internet, data/informasi	30 menit	Data dan Informasi Publik	
8	Dokumen informasi disimpan sebagai arsip	○	○	○	○	Komputer, ATK	15 menit	Arsip	